



Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Jejaring Kebijakan Publik di Kabupaten Garut

Rizky Ilhami

Universitas Padjajaran

rizkyilhami@unpad.ac.id

Abstract: *Non-governmental organizations (NGOs) play an important role in public policy networks as representatives of community interests, government partners, and advocacy actors. This study aims to analyze the role of NGOs in public policy networks in Garut Regency, as well as the challenges faced in increasing their contribution to policy formulation and implementation. The study uses a qualitative approach with descriptive-analytical methods. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies of actors involved in the policy network. The results show that NGO involvement is still symbolic, power relations between actors are not yet equal, NGO institutional capacity is limited, and coordination within the policy network is less than optimal. The lack of regulatory support also weakens the position of NGOs in the public policy process. This study concludes that strengthening the role of NGOs through institutionalizing their involvement, developing regulations, increasing capacity, and establishing equal partnership patterns are important steps to improve the effectiveness of public policy networks in Garut Regency.*

Keywords: *Non-Governmental Organizations, policy networks, public participation, Garut Regency*

Abstrak: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran penting dalam jejaring kebijakan publik sebagai representasi kepentingan masyarakat, mitra pemerintah, dan aktor advokasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran LSM dalam jejaring kebijakan publik di Kabupaten Garut, serta tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kontribusinya terhadap perumusan dan implementasi kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam jejaring kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan LSM masih bersifat simbolik, relasi kekuasaan antaraktor belum setara, kapasitas kelembagaan LSM terbatas, dan koordinasi dalam jejaring kebijakan kurang optimal. Minimnya dukungan regulasi juga memperlemah posisi LSM dalam proses kebijakan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran LSM melalui institusionalisasi keterlibatan, pengembangan regulasi, peningkatan kapasitas, dan pola kemitraan yang setara merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas jejaring kebijakan publik di Kabupaten Garut.

Kata kunci: Lembaga Swadaya Masyarakat, jejaring kebijakan, partisipasi publik, Kabupaten Garut

1. PENDAHULUAN

Pergeseran dari model tata kelola hierarkis ke tata kelola kolaboratif dan partisipatif mencerminkan perubahan signifikan dalam implementasi kebijakan publik. Transisi ini menekankan pentingnya jaringan kebijakan, yang terdiri dari berbagai aktor, termasuk organisasi pemerintah dan non-pemerintah, yang berinteraksi untuk membentuk hasil kebijakan (Ilhami, 2023). Dalam jaringan ini, organisasi non-pemerintah (LSM) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peran penting dengan mengadvokasi komunitas yang terpinggirkan dan mempromosikan keadilan sosial (Carneiro Neto et al., 2019). LSM meningkatkan efektivitas dan legitimasi proses pembuatan kebijakan melalui keterlibatan dan keahlian mereka, sehingga memfasilitasi tata kelola partisipatif (Ilhami, 2023). Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya mendorong keterlibatan warga negara tetapi juga

mengatasi kompleksitas tantangan kebijakan modern, menyoroti perlunya kerja sama di antara beragam pemangku kepentingan untuk mencapai hasil tata kelola yang sukses (Sukandi, A., 2024).

Organisasi Non-Pemerintah (LSM) memainkan peran penting dalam mewakili kepentingan publik dan bertindak sebagai pengawas kebijakan, terutama dalam konteks pengembangan kebijakan regional. Dengan terlibat dalam jaringan kebijakan, LSM dapat secara efektif memberikan masukan berbasis kebutuhan masyarakat, yang penting untuk menciptakan kebijakan publik responsif yang mengatasi tantangan lokal (Akurugoda, 2022). Keterlibatan mereka mempromosikan transparansi dan memperkuat akuntabilitas kebijakan, memastikan bahwa pembuat kebijakan tetap bertanggung jawab atas efektivitas dan efisiensi keputusan mereka. Selain itu, LSM melakukan penilaian kebutuhan masyarakat, yang membantu mengidentifikasi isu-isu lokal tertentu dan memprioritaskannya dalam proses pembuatan kebijakan (Žibera et al., 2025). Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan inklusivitas kebijakan publik tetapi juga menumbuhkan struktur tata kelola yang lebih akuntabel, yang pada akhirnya mengarah pada hasil yang lebih baik bagi masyarakat.

Kabupaten Garut, yang bercirikan lanskap sosial dan ekonominya yang beragam, menghadapi tantangan yang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan publik, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya lokal. Keterlibatan LSM dalam jaringan kebijakan publik sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan responsif dan inklusif, terutama untuk kelompok yang terpinggirkan (Rabbani et al., 2025). LSM dapat mengadvokasi layanan publik yang lebih baik dan berkolaborasi dengan lembaga pemerintah untuk mengembangkan strategi pengentasan kemiskinan yang efektif, seperti inisiatif pendidikan dan pelatihan kerja. Namun, efektivitas LSM dalam jaringan ini sering dibatasi oleh berbagai kendala, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mempengaruhi keputusan kebijakan secara efektif (Ghimire, 2023). Selain itu, praktik pengelolaan sumber daya lokal yang berkelanjutan sangat penting untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memerlukan kolaborasi yang kuat antara LSM dan entitas pemerintah (Widaningsih et al., 2024). Mengatasi keterbatasan ini sangat penting untuk meningkatkan dampak kebijakan publik secara keseluruhan di Kabupaten Garut.

Studi Lembaga Swadaya Masyarakat (SCHI) di Kabupaten Garut menyoroti kesenjangan yang signifikan antara peran potensial dan aktual LSM dalam jaringan kebijakan publik. SCHI, sebagai organisasi yang dikelola masyarakat, sangat penting dalam menangani kebutuhan lokal dan dapat meningkatkan pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan melalui tata kelola yang

efektif dan pembangunan kapasitas (Widaningsih et al., 2024). Dengan menganalisis dinamika jaringan kebijakan publik, yang mencakup berbagai aktor seperti LSM dan lembaga pemerintah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh CSHI dan kontribusinya terhadap tata kelola daerah (Rabbani et al., 2025). Memahami struktur tata kelola LSM ini sangat penting untuk memperkuat partisipasi mereka dalam jaringan kebijakan, sehingga meningkatkan dampaknya terhadap kebijakan publik.

KAJIAN PUSTAKA

1. Jejaring Kebijakan

Jejaring kebijakan (policy networks) merupakan pendekatan yang menjelaskan proses kebijakan publik sebagai hasil interaksi dan hubungan yang saling bergantung antara berbagai aktor. Rhodes (1997) mendefinisikan jejaring kebijakan sebagai pola hubungan yang relatif stabil antara aktor pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam proses kebijakan publik, di mana sumber daya, informasi, dan pengaruh didistribusikan di antara aktor-aktor tersebut. Pendekatan ini menekankan bahwa kebijakan publik tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah, melainkan dibentuk melalui proses kolaboratif.

Marsh dan Rhodes (1992) mengemukakan bahwa jejaring kebijakan memiliki karakteristik tertentu, seperti tingkat keanggotaan, intensitas interaksi, distribusi kekuasaan, dan stabilitas hubungan antaraktor. Dalam konteks pemerintahan daerah, jejaring kebijakan sering kali melibatkan aktor yang beragam, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Keberadaan jejaring kebijakan memungkinkan terjadinya koordinasi lintas sektor serta pertukaran sumber daya dalam proses kebijakan.

Pendekatan jejaring kebijakan relevan untuk memahami tata kelola kebijakan publik di tingkat lokal karena mampu menjelaskan dinamika relasi kekuasaan dan kepentingan antaraktor. Jejaring kebijakan yang inklusif dan terbuka berpotensi meningkatkan kualitas kebijakan publik melalui partisipasi dan kolaborasi yang lebih luas.

2. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Kebijakan Publik

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan aktor non-pemerintah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Menurut Purnomo (2024), LSM berfungsi sebagai representasi kepentingan masyarakat, pelaksana program sosial, serta

pengawas kebijakan publik. Peran tersebut menjadikan LSM sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam proses kebijakan.

Dalam perspektif jejaring kebijakan, LSM berperan sebagai aktor yang menyediakan informasi, advokasi kebijakan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Keterlibatan LSM dalam jejaring kebijakan dapat memperkuat legitimasi dan akuntabilitas kebijakan publik. Selain itu, LSM juga berkontribusi dalam mendorong partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Namun, efektivitas peran LSM dalam jejaring kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, akses terhadap proses pengambilan keputusan, serta kualitas hubungan dengan aktor pemerintah. Oleh karena itu, penguatan peran LSM dalam jejaring kebijakan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola kebijakan publik yang partisipatif dan demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam jejaring kebijakan publik, khususnya dalam melihat pola interaksi, bentuk partisipasi, serta kontribusi LSM dalam proses kebijakan publik di Kabupaten Garut. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Garut dengan fokus pada jejaring kebijakan publik yang melibatkan LSM dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Fokus kajian diarahkan pada hubungan antara LSM, pemerintah daerah, dan aktor lain dalam jejaring kebijakan publik, serta faktor-faktor yang memengaruhi peran LSM.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Hasil penelitian dilapangan didapatkan Identifikasi Permasalahan Empiris Peran LSM dalam Jejaring Kebijakan Publik di Kabupaten Garut

Dalam praktik jejaring kebijakan publik di Kabupaten Garut, keterlibatan LSM sering kali bersifat simbolik dan terbatas pada tahap konsultasi formal. LSM belum dilibatkan secara substansial dalam proses perumusan kebijakan, terutama pada tahap penentuan agenda dan pengambilan keputusan. Kondisi ini menyebabkan aspirasi masyarakat yang dibawa oleh LSM kurang terakomodasi secara optimal.

Relasi antara pemerintah daerah dan LSM dalam jejaring kebijakan publik menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan. Pemerintah daerah masih berperan dominan sebagai pengendali utama proses kebijakan, sementara LSM berada pada posisi yang relatif lemah. Ketimpangan ini membatasi ruang gerak LSM untuk melakukan advokasi kebijakan secara efektif.

Sebagian LSM di Kabupaten Garut menghadapi keterbatasan kapasitas kelembagaan, baik dari sisi sumber daya manusia, pendanaan, maupun kemampuan teknis dalam analisis kebijakan. Keterbatasan ini menghambat peran strategis LSM dalam jejaring kebijakan publik dan memengaruhi kualitas kontribusi yang dapat diberikan.

Koordinasi dan komunikasi antara LSM, pemerintah daerah, dan aktor lainnya dalam jejaring kebijakan publik masih belum berjalan secara optimal. Hubungan yang terbangun cenderung bersifat ad hoc dan tidak berkelanjutan. Akibatnya, pertukaran informasi dan pembelajaran bersama dalam jejaring kebijakan menjadi terbatas.

Permasalahan empiris lainnya adalah minimnya regulasi daerah yang secara eksplisit mengatur dan memperkuat peran LSM dalam jejaring kebijakan publik. Ketidadaan kerangka regulasi yang jelas menyebabkan peran LSM sangat bergantung pada kebijakan sektoral atau kehendak aktor pemerintah tertentu.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam jejaring kebijakan publik di Kabupaten Garut belum berjalan secara optimal. Keterlibatan LSM yang masih bersifat simbolik mencerminkan karakter jejaring kebijakan yang cenderung hierarkis dan belum inklusif. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Rhodes (1997) yang menegaskan bahwa jejaring kebijakan yang efektif ditandai oleh hubungan saling ketergantungan antaraktor. Ketika LSM hanya dilibatkan secara formal, relasi saling ketergantungan tersebut tidak terbentuk secara substantif. Pemerintah Kabupaten Garut perlu menginstitutionalisasi keterlibatan LSM dalam jejaring kebijakan publik melalui pembentukan forum kolaboratif yang bersifat resmi dan berkelanjutan. Forum ini berfungsi sebagai ruang dialog kebijakan antara pemerintah daerah, LSM, dan aktor lainnya sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan. Institutionalisasi ini akan mengurangi keterlibatan simbolik LSM dan memperkuat posisi mereka sebagai mitra strategis pemerintah.

Ketimpangan relasi kekuasaan antara pemerintah daerah dan LSM menunjukkan bahwa struktur jejaring kebijakan di Kabupaten Garut masih didominasi oleh aktor pemerintah. Marsh

dan Rhodes (1992) menjelaskan bahwa distribusi kekuasaan yang tidak seimbang dalam jejaring kebijakan akan membatasi peran aktor non-pemerintah dalam memengaruhi proses kebijakan. Dalam konteks ini, LSM belum memiliki akses yang memadai terhadap proses pengambilan keputusan, sehingga fungsi advokasi kebijakan belum dapat dijalankan secara maksimal. Diperlukan penyusunan atau penguatan regulasi daerah yang secara eksplisit mengatur peran LSM dalam proses kebijakan publik. Regulasi tersebut dapat memuat mekanisme partisipasi, hak akses informasi, serta perlindungan terhadap fungsi advokasi LSM. Kerangka regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan legitimasi peran LSM dalam jejaring kebijakan.

Keterbatasan kapasitas kelembagaan LSM juga memperkuat posisi subordinat LSM dalam jejaring kebijakan publik. Perspektif jejaring kebijakan menekankan pentingnya pertukaran sumber daya antaraktor. Ketika LSM memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan teknis, kontribusi mereka dalam jejaring kebijakan menjadi kurang signifikan. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas dialog kebijakan dan minimnya inovasi kebijakan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Penguatan peran LSM juga memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan analisis kebijakan, advokasi, dan pengelolaan organisasi. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan menggandeng perguruan tinggi dan lembaga donor. Peningkatan kapasitas ini akan memperkuat kontribusi LSM dalam pertukaran sumber daya dan pengetahuan dalam jejaring kebijakan.

Lemahnya koordinasi dan komunikasi antaraktor menunjukkan bahwa jejaring kebijakan di Kabupaten Garut belum terinstitusionalisasi secara berkelanjutan. Jejaring yang bersifat ad hoc cenderung menghasilkan hubungan yang rapuh dan tidak mendukung pembelajaran kolektif. Selain itu, minimnya dukungan regulasi terhadap peran LSM memperkuat ketidakpastian posisi LSM dalam jejaring kebijakan publik. Tanpa kerangka regulasi yang jelas, keterlibatan LSM sangat bergantung pada preferensi aktor pemerintah, yang berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik. Jejaring kebijakan publik di Kabupaten Garut perlu dikembangkan berdasarkan prinsip kemitraan yang setara antara pemerintah daerah dan LSM. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pengendali, tetapi sebagai koordinator dan fasilitator kolaborasi. Pola kemitraan yang setara akan meningkatkan kepercayaan (trust) dan komitmen bersama antaraktor dalam jejaring kebijakan.

Solusi lainnya adalah penguatan mekanisme komunikasi dan pembelajaran bersama melalui pertemuan rutin, evaluasi kolaboratif, dan pertukaran praktik baik. Pembelajaran bersama akan memperkuat jejaring kebijakan yang adaptif dan mendorong peran LSM dalam

meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kebijakan publik di Kabupaten Garut. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa penguatan peran LSM dalam jejaring kebijakan publik memerlukan perubahan struktur jejaring menuju pola yang lebih setara, kolaboratif, dan terlembaga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki potensi strategis dalam jejaring kebijakan publik di Kabupaten Garut, terutama sebagai representasi kepentingan masyarakat, aktor advokasi, dan mitra pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya, peran LSM dalam jejaring kebijakan publik belum berjalan secara optimal. Keterlibatan LSM masih bersifat simbolik, relasi kekuasaan antaraktor belum setara, serta koordinasi dan komunikasi dalam jejaring kebijakan masih lemah. Temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa keterbatasan kapasitas kelembagaan LSM dan minimnya dukungan regulasi daerah memperlemah posisi LSM dalam proses kebijakan publik. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kontribusi LSM dalam perumusan dan pengawasan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Struktur jejaring kebijakan yang cenderung hierarkis menyebabkan potensi kolaborasi dan pembelajaran bersama tidak berkembang secara optimal. Oleh karena itu, penguatan peran LSM dalam jejaring kebijakan publik memerlukan langkah strategis berupa institusionalisasi keterlibatan LSM, penguatan kerangka regulasi daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan pola kemitraan yang setara dan berkelanjutan. Dengan penguatan tersebut, jejaring kebijakan publik di Kabupaten Garut diharapkan mampu mendorong tata kelola kebijakan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Carneiro Neto, J. A., Guedes, D. R., do Nascimento, D. A., & Ibiapina de Sousa, H. P. A. (2019). Governança Pública no Contexto de Implementação das Políticas Públicas. *Razón y Palabra*, 23(104), 459–478.
<https://archivos.juridicas.profeco.unam.revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/article/view/1363>

- Ghimire, B. R. (2023). Public Policy and Local Development: An Analysis with Nepalese Perspective. *Humanities and Social Sciences Journal*. <https://doi.org/10.3126/hssj.v15i1-2.63782>
- Ilhami, R. (2023). *Policy Network Actors as Units of Public Policy Analysis*. 1(02), 103–111. <https://doi.org/10.58471/ju-sosak.v1i02.288>
- Ilhami, R. (2023). Strengthening Policy Networks to Create Effective Public Policies. *Neo Journal of Economy and Social Humanities*. <https://doi.org/10.56403/nejesh.v2i3.143>
- Marsh, D., & Stoker, G. (2019). *Teori dan metode dalam ilmu politik*. Nusamedia.
- NGOs as Partners of Local Development and Governance: The Sri Lankan Experience. (2022). *Journal of Management Policy and Practice*, 23(3). <https://doi.org/10.33423/jmpp.v23i3.5739>
- Purnomo, M. A., & Yunazwardi, M. I. (2024). Analisa Akuntabilitas International Non-Governmental Organization: Studi Kasus BRAC. *Social Science Research Journal*, 1(1), 43-52.
- Rabbani, H., Yuliani, D., & Susilawati, S. (2025). Strategi kolaborasi hexahelix berbasis pemberdayaan komunitas serikandi biru dalam pemanfaatan sumber daya kabupaten garut. *Development*, 4(3), 422–439. <https://doi.org/10.46773/djce.v4i3.2564>
- Rabbani, H., Yuliani, D., & Susilawati, S. (2025). Strategi kolaborasi hexahelix berbasis pemberdayaan komunitas serikandi biru dalam pemanfaatan sumber daya kabupaten garut. *Development*, 4(3), 422–439. <https://doi.org/10.46773/djce.v4i3.2564>
- Rhodes, R. A. (1997). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University.
- Sukandi, A. (2024). Analysis of opportunities and challenges for Subang city within the framework Rebana triangle economic region. *Journal of Law, Social Science and Humanities*, 2(1), 68-83.
- Widaningsih, Rulandari, N., & Ulumudin, A. (2024). Optimization of Institutional Roles Based on Regional Leadership Commitment (A Case Study in Garut Regency). *Ilomata International Journal of Social Science*. <https://doi.org/10.61194/ijss.v5i1.1136>
- Widaningsih, Rulandari, N., & Ulumudin, A. (2024). Optimization of Institutional Roles Based on Regional Leadership Commitment (A Case Study in Garut Regency). *Ilomata International Journal of Social Science*. <https://doi.org/10.61194/ijss.v5i1.1136>
- Žiberna, T. R., Rihter, L., & Rakar, T. (2025). Complementing the State: NGOs and the Challenge of Providing Inclusive Public Services in Slovenia. *Social Inclusion*, 13. <https://doi.org/10.17645/si.10399>